

# JURNAL KOMUNIKASI

---

---

Volume 2, Nomor 2, April 2008

ISSN 1907-848X

Halaman 297 - 392

---

---

## DAFTAR ISI

### MENELISIK MEDIA DALAM KACAMATA BUDAYA POPULER

#### Editorial

#### **Menginterogasi Budaya: Memperkarakan Metodologi dalam Kajian Budaya**

*Budi Irawanto*  
( 297 - 304 )

#### **“Infotainment” : Paradoks Liberalisme dan Representasi Moral Darwinisme Sosial**

*Puji Rianto*  
( 305 - 314 )

#### **Sinetron Religius: Sinetron Islami?**

*Muzayin Nazaruddin*  
( 315 - 330 )

#### **Konser Musik di Media: “Common Culture”, Anti-otentisitas dan Budaya Populer**

*M. Ridha al Qadri*  
( 331 - 340 )

#### **Melacak Ideologi di Balik Gemuruh “Heavy Metal”**

*Fajar Junaedi*  
( 341 - 352 )

#### **Hantu Populer di Film Indonesia**

*Zein Mufarrih Muktaf*  
( 353 - 362 )

#### **Mediasi Batik sebagai Budaya Populer: dari Habitus ke Gaya Hidup**

*Fionna Christabella*  
( 363 - 372 )

#### **Rambut dan Identitas Perempuan: Membaca Rambut Perempuan di Media Massa**

*Rina Widiastuti*  
( 373 - 382 )

#### **“Mannequin/Mankind Culture”: Mempertanyakan “Ada” pada Manekin dan Manusia**

*Luthfi Adam*  
( 383 - 392 )

# Menginterogasi Budaya: Memperkarakan Metodologi dalam Kajian Budaya <sup>1</sup>

*Budi Irawanto* <sup>2</sup>

## **Abstract**

*Methodology in cultural studies has triggered some conflicting discourses hence it has become harder, not easier, to be pinned down and defined neatly. Since its inception cultural studies was dubbed as "an intellectual guerrilla" against the rigidity of disciplines in the academia. Further, in cultural studies knowledge is perceived as a practice rather than a sum of abstract propositions or general objective laws. This article argues that methodology in cultural studies is far to be "objective" (as defined by the positivist approach) since it context-bonded influenced by social position, historical moment and particular political agendas.*

## **Keywords:**

*Cultural studies, methodology, knowledge, practice, positionality*

## **Pendahuluan**

Syahdan, pada bulan Juni 1994 Seno Gumira Ajidarma, sastrawan dan kritikus film, mampir ke Bielefeld (Jerman) menemui sosiolog Ignas Kleden yang tengah merampungkan program doktoralnya. Ketika ia menanyakan perkara metodologi pada Ignas, maka ia memperoleh jawaban yang menurutnya melegakan: "Metodologi itu *taik kucing*, pokoknya Bung tulis saja pikiran-pikiran yang ada di kepala Bung!" Kisah ini ditulis Seno dalam pengantar bukunya berjudul *Layar Kata: Menengok 20 Skenario Pemenang Citra Festival Film Indonesia 1973-1992* (2000).

Sengaja saya kemukakan kembali kisah ini sekadar mengingatkan bahwa metodologi bukanlah segala-galanya. Ia bukan sesuatu yang mesti dipuja dan diberhalakan, meski bukan berarti tak punya nilai sama sekali. Metodologi adalah sebuah studi, atau perhatian yang eksplisit, terhadap metode (cara) investigasi dari beragam riset atau seperangkat metode yang digunakan pada satu cabang ilmu. Pendeknya, metodologi tidaklah berkaitan dengan rincian teknis tentang metode, melainkan lebih pada pendekatan filosofis yang mendasarinya.

Akan tetapi, dalam konteks kajian budaya (*cultural studies*), metodologi justru menjadi sumber silang sengketa. Tentu saja, ini tak berarti tidak ada metodologi dalam kajian budaya. Sebaliknya, metodologi bukanlah sesuatu yang gampang dirumuskan

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam Diskusi Dwimingguan Forum Ilmu Sosial dan Humaniora dengan tema "Metodologi Penelitian *Cultural Studies*" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP), Universitas Gadjah Mada (UGM), Gedung PAU Pascasarjana, Yogyakarta, 10 Agustus 2007.

<sup>2</sup> Pengajar pada Program Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM dan Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), UGM.

dengan gamblang berikut batas-batasnya. Ini mengingat watak kajian budaya itu sendiri yang kerap dianggap “interdisipliner,” “multidisipliner,” “transdisipliner,” “pascadisipliner,” bahkan “antidisipliner.” Seluruh imbuhan “inter, multi, trans, pasca dan anti” tersebut sejatinya mengisyaratkan betapa kajian budaya telah melebur dan membaurkan kekakuan batas-batas disiplin ilmu. Bahkan, pada awal perkembangannya, kajian budaya pernah mengklaim dirinya sebagai bagian dari sebuah gerakan gerilya intelektual yang memerangi batas-batas dunia akademik resmi. Angela McRobbie (1992) pernah mengemukakan bahwa kajian budaya adalah medan yang diperebutkan yang tak boleh kehilangan kelonggaran disiplinernya. Memang ada ikhtiar yang dilakukan oleh Alasuutari untuk merumuskan metodologi kajian budaya dalam bukunya *Researching Culture* (1995). Namun, ia menjadi sesuatu yang terlihat eksentrik di tengah keenganan kalangan pengkaji budaya untuk merumuskan secara jelas dan terang metodologinya.

Apa pun soalnya, yang jauh lebih penting adalah kajian budaya melibatkan gagasan ihwal perlintasan antara teori dan tindakan. Inilah sejatinya watak penting dari kajian budaya dibandingkan dengan disiplin lainnya, yakni pertautan yang erat antara kajian budaya dengan politik atau kekuasaan. Kajian budaya menekankan pentingnya perubahan dan representasi dari dan untuk kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, terutama yang diakibatkan oleh persoalan kelas, gender dan ras (termasuk pula kaum lanjut usia, orang-orang difabel, dan sebagainya). Dieja secara lain, pengetahuan tidak pernah dipandang sebagai fenomena netral dan objektif, melainkan sebagai persoalan “posisionalitas”: persoalan di mana, kepada siapa dengan tujuan apa seseorang berbicara (Barker, 2003: 6).

Di sisi lain, persoalan yang mesti dihadapi ketika hendak merumuskan metodologi dalam kajian budaya terletak pada kata “budaya” (*culture*) itu sendiri yang melekat dalam *term* kajian budaya. Sebagaimana pernah dikatakan oleh perintis kajian budaya Inggris, Raymond Williams (1983), kata “budaya” merupakan “salah satu dari dua atau tiga kata yang paling rumit dalam bahasa Inggris”. Meski demikian, barangkali rumusan yang cukup komprehensif bisa kita temukan pada Stuart Hall. Menurut Stuart Hall (1996: 439), “Yang saya maksud budaya di sini adalah medan nyata tempat praktik-praktik, representasi-representasi, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat berpijak. Saya juga memahami budaya sebagai bentuk-bentuk kontradiktif akal sehat yang sudah mengakar pada dan ikut membentuk kehidupan sehari-hari.” Dengan kata lain, budaya berkaitan dengan pertanyaan tentang makna-makna sosial, yakni beragam cara kita memahami dunia yang dilakukan lewat praktik-praktik penandaan dan signifikasi.

Tulisan ringkas ini merupakan ikhtiar untuk menelisik lebih jauh persoalan metodologi dalam kajian budaya. Sebelum mendiskusikan lebih jauh metode-metode utama dalam kajian budaya, terlebih dahulu dipaparkan lokus (posisi) teori dalam kajian budaya. Ini penting mengingat kajian budaya senantiasa melihat teori secara politis. Argumen yang hendak dibangun dalam tulisan ini adalah metodologi tidak pernah bisa “objektif”, melainkan senantiasa terikat oleh konteks yang dipengaruhi oleh posisi sosial, momen historis dan agenda-agenda tertentu.

## Lokus Teori dalam Kajian Budaya

Dalam kajian budaya teori memiliki posisi yang khas lebih dari sekadar cara untuk menangkap dunia secara akurat. Teori dipahami sebagai alat, instrumen atau logika untuk mengatasi dunia melalui mekanisme deskripsi, definisi, prediksi dan kontrol. Konstruksi teori adalah usaha diskursif yang bersifat sadar (*self-reflexive*) yang bertujuan menafsirkan dan mengintervensi dunia. Dengan demikian, teori tidaklah berjarak dengan tindakan dan dunia nyata.

Berbeda dengan penganut empirisme ortodoks yang memandang pengetahuan sekadar masalah pengumpulan fakta yang digunakan untuk menguji (mendeduksi) teori, kajian budaya melihat teori senantiasa implisit dalam setiap penelitian empiris. Fakta lantas tidak bersifat netral serta tak ada segepok fakta yang mampu mengisahkan hidup kita tanpa ada teori di dalamnya. Bahkan, bagi Chris Barker (2003: 44), "Teori adalah kisah kemanusiaan yang punya implikasi bagi tindakan dan penilaian tentang konsekuensi-konsekuensinya".

Oleh karena itu, kajian budaya mengambil peran demistifikasi, untuk menunjukkan karakter terkonstruksi teks-teks kebudayaan dan berbagai mitos dan ideologi yang tertanam di dalamnya, dengan harapan bisa melahirkan posisi-posisi subjek maupun subjek yang sesungguhnya, yang melawan subordinasi (Barker, 2005: 44). Di sini tampak jelas bahwa kajian budaya membawa elan transformatif dan pengambilan posisi tatkala mengonstruksikan teori.

## Pendekatan Metodologis Utama dalam Kajian Budaya

Chris Barker (2003: 36) menyatakan penelitian dalam kajian budaya terpusat pada tiga macam pendekatan utama: (1) *etnografi*, yang sering dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan kulturalis dan penekanan pada pengalaman "hidup sehari-hari"; (2) beberapa jenis pendekatan *tekstual*, yang cenderung mengambil dari semiotika, pascastrukturalisme dan dekonstruksi Derridarian; (3) serangkaian kajian *resepsi* yang akar teoritisnya bersifat eklektik.

Kajian budaya etnografis memusatkan perhatian pada penjelajahan kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks 'keseluruhan cara hidup', yaitu dengan persoalan kebudayaan, dunia-kehidupan (*life-worlds*) dan identitas. Dalam kajian budaya yang berorientasi media, etnografi menjadi kata yang mewakili beberapa metode kualitatif, termasuk pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah. Akan tetapi, ada beberapa kritik pada etnografi yang patut disimak. *Pertama*, data yang dipresentasikan oleh seorang etnografer selalu sudah merupakan sebuah interpretasi yang dilakukan melalui mata seseorang (sumber data), dan dengan demikian selalu bersifat posisional. Namun, ini adalah argumen yang bisa diajukan pada segala bentuk penelitian. Argumen ini hanya menunjuk pada 'etnografi interpretatif'.

*Kedua*, etnografi dianggap hanya sebagai sebuah genre penulisan yang menggunakan alat-alat retorika, yang seringkali disamarkan, untuk mempertahankan klaim-klaim realisnya (Clifford dan Marcus, 1986). Argumen ini mengarah pada pemeriksaan teks-teks etnografis untuk mencari alat-alat retorikanya, serta pada pendekatan yang lebih reflektif dan dialogis terhadap etnografi yang menuntut seorang penulis untuk memaparkan asumsi, pandangan dan posisi-posisi mereka. Di samping

itu, konsultasi dengan para 'subjek' etnografi perlu dilakukan agar etnografi tidak menjadi ekspedisi pencarian 'fakta-fakta', dan lebih menjadi percakapan antara mereka yang terlibat dalam proses penelitian. Bagaimanapun, data etnografis memberi ekspresi puitis pada suara-suara dari budaya-budaya lain atau dari wilayah pinggiran budaya kita sendiri.

Selanjutnya, kendatipun kajian tekstual memiliki beragam varian, termasuk 'kritisisme literer', ada dua corak analisis yang paling banyak dipakai dalam kajian budaya, yaitu semiotika dan analisis narasi. Semiotika menstudi bagaimana makna dari sebuah teks bisa diperoleh melalui pengaturan tertentu tanda-tanda dan penerapan kode-kode kultural. Analisis ini menaruh perhatian pada ideologi atau mitos-mitos dari teks. Misalnya, analisis semiotik menggambarkan bagaimana berita televisi adalah suatu representasi yang dikonstruksi dan bukan sebuah cermin realitas. Representasi-representasi media yang sarat-nilai dan selektif bukanlah gambaran yang 'akurat' tentang dunia, melainkan medan-medan persaingan untuk memperebutkan apa yang akan dianggap sebagai makna dan kebenaran.

Sementara itu, analisis narasi memiliki tempat penting pula dalam kajian budaya. Narasi adalah penuturan yang tertata dan urut (sekuensial) yang mengklaim dirinya sebagai rekaman sebuah kejadian. Narasi juga merupakan bentuk terstruktur yang digunakan suatu cerita/kisah untuk mengajukan penjelasan tentang tata-cara dunia. Narasi memberi kita kerangka pemahaman dan aturan mengenai bagaimana tatanan sosial dibentuk. Meski kisah bisa mengambil bermacam bentuk, menggunakan beragam karakter, pokok persoalan dan struktur narasi (atau cara menceritakan sebuah kisah), teori strukturalis lebih menaruh perhatian pada ciri-ciri umum pembentukan cerita.

Di sisi lain, para pelopor kajian resepsi atau konsumsi mengatakan bahwa apa pun analisis tekstual atas makna yang dilakukan seorang penulis, masih belum bisa dipastikan makna-makna yang manakah, kalau memang ada, yang diaktifkan/diambil oleh para pembaca/khalayak/konsumen yang sesungguhnya. Artinya, khalayak merupakan pencipta makna yang aktif dalam hubungannya dengan teks. Mereka menerapkan berbagai kompetensi kultural yang diperoleh sebelumnya untuk membaca teks, sehingga khalayak dengan susunan yang berbeda akan menggeluti makna-makna yang berbeda pula.

Di garda depan teoretis, model '*encoding-decoding*' dari Hall (1981) terbukti memiliki pengaruh paling penting. Hall mengatakan bahwa produksi makna tidak menjamin dikonsumsinya makna tersebut sesuai yang dimaksudkan oleh *encoder*-nya karena pesan-pesan (televisi), yang dikonstruksi sebagai sistem tanda dengan berbagai komponen yang *multi-accentuated*, bersifat polisemik, atau mereka memiliki lebih dari satu rangkaian makna potensial. Sampai pada bahwa khalayak turut terlibat dalam kerangka kultural bersama para produser, maka pembacaan oleh khalayak masih tidak berbeda dengan produksi tekstual. Namun, jika anggota khalayak bertempat pada posisi sosial yang berbeda (misalnya, dalam hal kelas atau gender) dari para produser teksnya, dengan segala sumberdaya kultural yang ada pada mereka, mereka akan bisa membaca program-program itu secara alternatif.

Kendatipun kajian budaya mengakui adanya validitas yang jamak (*multiple validities*), tidak berarti tiada aturan sama sekali dalam melakukan riset. Oleh karena itu, menurut Paula Saukko (2003: 18) setidaknya ada tiga pendekatan metodologis yang utama dalam kajian budaya yang memiliki implikasi validitas yang berbeda. *Pertama*, pendekatan metodologis hermeneutik, yang mengikuti “validitas dialogis,” melakukan evaluasi terhadap riset dalam menangkap realitas yang hidup dari sang liyan (*the others*). *Kedua*, pendekatan metodologis pascastrukturalis, yang mempunyai “validitas dekonstruktif,” menilai suatu riset dalam menyingkap problematika wacana sosial yang memediasi cara kita mempersepsi realitas dan sang lain. *Ketiga*, pendekatan metodologis kontekstualis dan realis, yang mengusung “validitas kontekstualis,” mengevaluasi riset dalam kemampuannya memahami konteks sosial, ekonomi dan politis serta kaitannya dengan fenomena yang tengah diteliti. Jika kita simak lebih jauh, ketiga pendekatan metodologis tersebut sesungguhnya kongruen dengan pendekatan awal dalam kajian budaya seperti pendekatan humanistik, strukturalis dan pendekatan Kiri Baru yang kontekstualis.

Dihadapkan pada beragam pendekatan metodologis di atas, pertanyaannya lantas: mungkinkah menggabungkan tiga pendekatan itu dalam sebuah proyek penelitian? Tentu saja, menggabungkan pendekatan metodologis sangat mungkin dilakukan jika kita memang berkehendak meneruskan tradisi dalam kajian budaya yang menstudi *interplay* antara pengalaman yang hidup, wacana dan teks serta konteks sosial, historis dan politis.

Kadangkala sebuah proyek penelitian hanya mengikuti satu kaidah validitas saja. Misalnya, sejumlah riset etnografi yang baru hanya berkonsentrasi pada ikhtiar yang keras untuk merengkuh dunia yang hidup dan senyatanya. Hal yang sama dilakukan analisis tekstual yang kritis terhadap teks media yang hendak menyingkap otoritas kebenaran.

Selama dalam tradisi ilmu sosial dikenal adanya istilah triangulasi yang berarti kombinasi pelbagai metode dan materi penelitian. Tujuan klasik dari triangulasi adalah melengkapi kelemahan satu metode dengan metode lainnya. Umpamanya, dalam penelitian tentang suku Jawa sang peneliti menggunakan metode pengamatan terlibat yang dikombinasikan dengan penelitian arsip-arsip kolonial untuk menemukan “kebenaran” dengan mencek apakah mereka “berbohong” atau tidak lagi bisa mengingat banyak hal di masa lalu. Akan tetapi, jika upaya pencarian kebenaran bersifat interpretatif, triangulasi tiga pendekatan metodologis di atas tak banyak memberikan manfaat. Ini karena tujuan dasar dari ketiga pendekatan itu justru hendak memproblematisasi apa yang disebut dengan “kebenaran” itu sendiri. Oleh karena itu, ketimbang menggunakan triangulasi, Richardson (2000) menyarankan apa yang disebutnya dengan kristalisasi (*crystallization*). Istilah kristal di sini mengacu pada bentuk prisma. Kristal tak hanya “merefleksikan eksternalitas (hal-hal yang ada di luar) (*reflect externalities*), tetapi memecah eksternalitas itu dalam dirinya sendiri (*refract them within themselves*)”. Metafora ini menggarisbawahi bahwa realitas akan berubah jika kita mengubah *angle* metodologis atau perspektif dari mana kita memandangnya. Di samping itu, metafora prisma mengandaikan realitas yang bersifat cair (dalam

pengertian ontologis) dan memandang penelitian sebagai cara mengonstruksi realitas (dalam pengertian epistemologis) ketimbang menempatkan tugas penelitian sekadar cara menggambarkan realitas secara akurat.

### **Penutup**

Tatkala kajian budaya menuai popularitas, ia sesungguhnya berada dalam situasi yang justru bisa memerangkap dirinya sendiri. Para pendukung kajian budaya senantiasa mencemaskan bahwa “formalisasi” dan “profesionalisasi” kajian budaya bisa mematikan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kekuasaan, sejarah dan politik. Oleh karena itu, metodologi dalam kajian budaya sejatinya dituntut untuk senantiasa membuka ruang dialogis yang mengundang kalangan dari mana pun untuk terlibat. Sebagaimana pernah diserukan oleh Hannah Arendt ihwal “cara berpikir yang jembar” (*an enlarged way of thinking*):

*[an] enlarged way of thinking, which, as judgment knows how to transcend its individual limitations, cannot function in strict isolation or solitude; it needs the presence of others 'in whose place' it must think, whose perspective it must take into consideration, and without whom it never has the opportunity to operate at all (seperti disitir oleh Couldry, 2000: 144).*

Di sinilah kajian budaya senantiasa mencoba menautkan analisis dengan nilai-nilai, metodologi dan politik, serta menyediakan ruang bagi setiap tindakan yang berkaitan dengan budaya dan cara berpikir yang terbuka. Pendeknya, kajian budaya meniscayakan sikap reflektif dalam menguak realitas lewat perspektif yang senantiasa bersifat politis. Barangkali, ini sedikit berbeda dengan gagasan Bennett (1997) yang menempatkan intelektual pengkaji budaya sekadar teknisi dari *governmentality* ketimbang sebagai intelektual organik bagi gerakan sosial yang mengalami subordinasi.

### **Daftar Pustaka**

- Ajidarma, Seno Gumira. 2000. *Layar Kata: Menengok 20 Skenario Pemenang Citra Festival Film Indonesia 1973-1992*. Yogyakarta: Bentang.
- Allasuutari, Pertii. 1995. *Researching Culture*. London: Sage.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Alihbahasa Tim KUNCI Cultural Studies Centre. Yogyakarta: Bentang.
- Bennett, Tony. 1997. “Towards a Pragmatics for Cultural Studies.” Dalam Jim McGuigan (ed.), *Cultural Methodologies*. London: Sage.
- Clifford, James & Marcus, George (eds.). 1986. *Writing Culture*. Berkeley: University of California Press.
- Couldry, Nick. 2000. *Inside Culture: Re-Imagining the Method of Cultural Studies*. London: Sage.

- Hall, Stuart. 1996. "On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart Hall." Dalam David Morley dan Kuan-Hsing Chen (eds.), *Stuart Hall*. London: Routledge.
- Hooks, Bell. 1991. *Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics*. Boston, MA: Turnaround.
- McGuigan, Jim. (Ed.). "Introduction." Dalam Jim McGuigan (ed.), *Cultural Methodologies*. London: Sage.
- McRobbie, Angela. 1992. "Post-Marxism and Cultural Studies: A Post-Script." Dalam Lawrence Grossberg dan Paul Treichler (ed.), *Cultural Studies*. London & New York: Routledge.
- Richardson, L. 2000. "Writing: A Method of Inquiry". Dalam Norman K. Denzin & Y. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Edisi kedua. London: Sage.
- Saukko, Paula. 2003. *Doing Research in Cultural Studies*. London: Sage.
- Smith, Linda Tuhiwai. 2005. *Dekolonisasi Metodologi*. Alihbahasa Nur Cholis. Yogyakarta: Insist Press.
- Williams, Raymond. 1983. *Keywords*. London : Fontana.

